

**Seminar Dies XXVI Fakultas Sastra
"Peran Pendidikan Humaniora
dalam Mewujudkan Demokrasi yang Bermartabat"**

**Kontestasi Ideologi Pasca Orde Baru
dan Peran Pendidikan Humaniora
dalam Demokratisasi Indonesia**

**oleh
Heri Setyawan**



Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | 26 April 2019

Kontestasi Ideologi Pasca Orde Baru dan Peran Pendidikan Humaniora dalam Demokratisasi Indonesia

Heri Setyawan

Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
hherisetya@usd.ac.id

Pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto 21 Mei 1998, situasi kebebasan mendorong munculnya beragam ekspresi dalam demokratisasi. Hal yang mencolok adalah munculnya partai-partai politik, kebebasan pers, dan organisasi kemasyarakatan. Walaupun begitu, Hadiz (2013) menyebut proses yang sedang terjadi bukanlah demokratisasi sebagaimana diidealkan, namun berkuasanya golongan elit-elit tertentu. Dalam konteks yang sama Tornquist (2018) mempersoalkan demokratisasi yang tidak mewadahi kepentingan warga dan pengakuan kewargaan, terlebih kelompok masyarakat minoritas dan kecil. Walaupun begitu, menurut penulis, demokratisasi di Indonesia khususnya dalam kebebasan berekspresi dan keterlibatan berpolitik menunjukkan bahwa demokratisasi di Indonesia mengalami kemajuan besar. Partisipasi warga untuk berpolitik, tumbuhnya budaya politik, dan terwadahnya ideologi politik menunjukkan demokratisasi yang berhasil.

Walaupun begitu, melihat demokratisasi Indonesia dengan gejala-gejala khusus yang akhir-akhir ini muncul, antara lain sentimen identitas yang menyeruak di tengah demokratisasi dalam beragam bentuk, entah kekerasan, populisme masif, politisasi identitas, maupun kesalehan individu dan komunal, beberapa pertanyaan yang mendesak perlu dipikirkan. Pertanyaan penting adalah apakah proses yang terjadi dalam demokratisasi Indonesia adalah kontestasi ideologi ataukah suatu bentuk lain dari proses demokrasi yang baru? Bagaimana perebutan dan pengaturan kekuasaan dapat menjadikan pluralitas warga sebagai basis positif demokrasi bukan sebagai komoditas politik perebutan kekuasaan semata?

Tulisan ini berargumen bahwa di tengah kontestasi ideologi-ideologi yang sejalan dengan cita-cita demokrasi terselubung politik transaksionalisme yang menjalar pada demokratisasi Indonesia. Terlebih lagi, politik transaksionalisme merambah pada politik identitas yang membahayakan demokrasi itu sendiri. Untuk itu, usaha untuk menguatkan demokratisasi perlu dilakukan, yakni dengan membangun konsolidasi budaya politik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Ketiga argumen tersebut akan dipaparkan dalam tulisan ini dengan berusaha menelusuri gejala-gejala sosial berkaitan dengan kontestasi ideologi-ideologi dalam demokratisasi pasca orde baru Indonesia, khususnya seputar pemilihan umum. Untuk melihat aspek komparatif dan sisi historis, maka di sana sini demokratisasi sekarang ini akan dibandingkan dengan demokratisasi pada pemilu tahun 1955 yang dianggap pemilu paling demokratis sebelum pasca reformasi. Setelah itu, tulisan akan berusaha menggali aspek pedagogis yang dapat disumbangkan oleh pendidikan humaniora bagi demokratisasi Indonesia, yakni memperkuat budaya politik.

Antara Kontestasi Ideologi dan Transaksionalisme Politik

Setelah terjadi fusi partai-partai politik pasca pemilu 1971, pemilu Indonesia selalu diikuti tiga peserta, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golongan Karya (Golkar). Baru pada pasca

orde baru, pemilu diikuti oleh berbagai partai politik. Euforia pasca bergantinya orde baru ditandai dengan munculnya partai-partai politik. Pemilu pertama pasca turunnya Soeharto, tahun 1999 diikuti 48 partai politik. Setelahnya, yakni pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019 diikuti lebih dari 12 partai.

Babak baru demokrasi Indonesia difasilitasi oleh tiga Undang-Undang yang dikeluarkan Presiden B.J. Habibie pengganti Soeharto. Habibie mengeluarkan undang-undang tentang Partai Politik (UU No 2 tahun 1999), undang-undang tentang Pemilihan Umum (UU No 3 th 1999), dan tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU No 4 th 1999). Sebagai hasilnya, tahun 1999 digelar pemilu pertama pasca reformasi untuk memilih anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II. Perubahan sistem pemilu kembali terjadi pasca amandemen UUD 1945 tahun 2002 sehingga presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu tidak hanya memilih wakil-wakil rakyat dalam DPR, namun juga memilih presiden beserta wakilnya. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung membuat pemilu menjadi semakin intens. Pemilu 2004 menghasilkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, demikian pula pemilu 2009. Pemilu 2014 menghasilkan kemenangan bagi Joko Widodo. Dan saat ini kita masih menunggu hasil pemilu 2019.

Dilihat dari keikutsertaan partai peserta pemilu, sejak pemilu 1999 jumlah peserta pemilu cukup dinamis, begitu juga dengan hasil yang diperoleh. Pemilu 1999 yang diikuti 48 partai politik menghasilkan lima partai dominan: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Parta Amanat Nasional (PAN). Sekalipun PDIP memenangkan pemilu, sidang umum MPR memutuskan Abdurrahman Wahid dan Megawati menjadi presiden dan wakil presiden RI. Data berikut memperlihatkan pemilu pasca orde baru:

| Pemilu | Jumlah Partai Peserta Pemilu | Hasil | |
|--------|----------------------------------|---|--|
| | | Legislatif | Presiden dan Wakil Presiden |
| 1999 | 48 partai | PDIP (33,7%), Partai Golkar (22,44%) PPP (10,71%), PKB (12,61%), PAN (7,12%) | Abdurrahman Wahid-Megawati (dipilih MPR) |
| 2004 | 24 partai | Partai Golkar (21,58%), PDIP (18,53%), PKB (10,71%), PPP (8,15%), Partai Demokrat (7,45%), PKS (7,34%), PAN (6,44%), PBB (2,62%), PBR (2,44%) | Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla |
| 2009 | 44 partai (38 nasional, 6 Lokal) | Partai Demokrat (20,85%), Partai Golkar (14,45%), PDIP (14,03%), PKS (7,88%), PAN (6,01%), PKB (4,94%), Partai Gerindra (4,46%), Partai Hanura (3,77%) | Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono |
| 2014 | 15 partai (12 nasional, 3 lokal) | PDIP (18,95%), Partai Golkar (14,75%), Partai Gerindra (11,81%), Partai Demokrat (10,19%), PKB (9,04%), PAN (7,59%), PKS (6,79%), PPP (6,53%), P ND (6,72%), P Hanura (5,25%) | Joko Widodo-Jusuf Kalla |

Menilik ideologi-ideologi partai peserta pemilu pasca orde baru, terlihat bahwa ideologi yang tersisa di Indonesia tinggal dua, yakni nasionalis dan agama. Dibandingkan dengan pemilu 1955, terjadi pengikisan ideologi yang signifikan.

Saat itu pemilu berlangsung dua tahap, yaitu untuk memilih anggota DPR dan Konstituante yang diikuti 29 partai politik.

Bila diringkas, kontestasi ideologi pada pemilu 1955 dimainkan tiga ideologi besar: nasionalis, agama, dan komunis. Oleh Sukarno, ketiga aliran ini kemudian dia rangkum dalam istilah NASAKOM. Namun, pembagian tiga ideologi tersebut juga mengandung penyederhanaan. Di balik tiga ideologi besar itu, Herbert Feith menambahkan bahwa terdapat dua aliran lain yakni tradisionalisme Jawa dan sosialisme demokrat (Feith dan Castles, 1988:lv). Feith dan Castles berpendapat beberapa partai berasaskan satu atau dua ideologi. Ideologi Marxis ditunjukkan oleh PKI, ideologi agama ditunjukkan NU, Masyumi, dan beberapa partai Katolik dan Kristen, ideologi nasionalis ditunjukkan oleh PNI dan Partai Indonesia Raya (PIR), dan ideologi sosialisme demokrat ditunjukkan oleh Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Murba. Tradisionalisme Jawa menurut Feith dan Castles juga sangat menentukan gerak partai, yakni partai NU yang pada saat yang sama juga berasaskan Islam (Feith dan Castles, 1988:lv-lvi).

Mengerucutnya ideologi-ideologi pasca orde baru ke dalam ideologi nasionalis dan agama membuat kedua ideologi saling berhadap-hadapan dengan tajam. Ideologi nasionalis ditunjukkan langsung oleh partai-partai lama maupun baru: Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai NasDem, dll. Sementara itu partai berbasis agama secara masif muncul dari agama Islam: PPP, PKB, PAN, PBB, PK(S), Partai Bintang Reformasi (PBR), dll. Partai berbasis agama Protestan dan Katolik yang pada pemilu 1955 cukup kuat (Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik), pasca orde baru hanya muncul dalam Partai Damai Sejahtera (PDS, pemilu 2004, 2009) dan Partai Damai Kasih Indonesia (PDKI, pemilu 2009). PDS cukup kuat pada pemilu 2004, namun kemudian kian merosot. Kedua partai ini sejak pemilu 2014 tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu karena tidak memenuhi persyaratan. Di samping jumlah partai Islam yang lebih banyak dibanding partai Kristen dan sejak 2014 partai Kristen tidak dapat berpartisipasi lagi, maka pada akhirnya kontestasi ideologi dalam pemilu sangat diwarnai pertarungan dua ideologi, yakni nasionalis dan agama, secara spesifik Islam.

Ideologi Partai Nasionalis vs Partai Islam

Partai-partai berideologi nasionalis secara eksplisit menunjukkan dirinya sebagai partai berasaskan Pancasila dan UUD 1945 sedangkan partai-partai Islam terlihat bernegosiasi antara berasas Islam dan Pancasila. Hal ini terlihat dari visi misi yang diusung masing-masing partai dan identitas partai yang dibangun di hadapan massa dan pendukungnya. Konflik ideologis antara dua kelompok justru tidak terlihat secara mencolok.

Partai nasionalis seperti PDIP dan Partai Golkar sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai nasionalis. PDIP secara historis bergantung pada identitas partai nasionalis (PNI) dan semangat nasionalis di bawah semangat Sukarno. Jejak-jejak perjuangan PDI di bawah represi orde baru pada masa pra reformasi semakin menyumbangkan semangat nasionalisme pada PDIP. Dalam visinya, PDIP langsung menunjuk visi partai sebagai “alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945”. Pada poin berikutnya PDIP memiliki visi menanamkan semangat nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan yang ia sebut Tri Sila. Di samping itu, sebagai Eka Sila adalah menentang individualisme dan menghidupkan semangat gotong royong.

Identifikasi serupa juga dibuat oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra untuk menyatakan dirinya sebagai partai nasionalis. Transformasi

besar-besaran dilakukan Partai Golkar untuk memperbarui diri dari identitas Golkar pada masa orde baru di bawah Soeharto, namun juga tidak meninggalkan ciri khas Golkar orde baru. Partai Golkar tetap menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan menguatkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu ciri khas Golkar terus dilanjutkan yakni melaksanakan pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan terjaminnya supremasi hukum. Sedangkan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono meroket pada pemilu 2009 namun turun pada 2014. Visi Partai Demokrat adalah mencapai pencerahan dalam kehidupan berbangsa. Demokrat juga menempatkan prinsip nasionalisme, humanisme, dan internasionalisme dalam visinya. Sementara itu Partai Gerindra lebih berbasis peningkatan ekonomi, yakni bercita-cita menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan sosial politik berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu identitas yang dibangun partai-partai Islam cukup dinamis dengan terutama mengambil identitas kebangsaan dan keislaman. Sejak awal, PKB (berdiri Juli 1998) mengenalkan diri sebagai partai berbasis Nahdhatul Ulama (NU) dan memosisikan diri sebagai partai terbuka serta menempatkan cita-cita Republik Indonesia dalam UUD 1945 sebagai pokok visinya. Ciri keislaman PKB ditunjukkan secara eksplisit pada visi ketiganya, yakni “mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah”. Selain itu, prinsip perjuangan PKB didefinisikan sebagai “pengabdian kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala*, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlusunnah Waljamaah*.”

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pembaruan Partai Keadilan (berdiri Juli 1998) menempatkan visi partainya bagi terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Masyarakat madani yang dimaksud adalah masyarakat maju berdasarkan pada nilai dan norma yang dilandasi keimanan, demokratis dan semangat gotong-royong. Konsep masyarakat madani bagi PKS yang perlu direalisasikannya adalah “*Ukhuwwah Islamiyyah* (ikatan keislaman), *Ukhuwwah Wathaniyyah* (ikatan kebangsaan) dan *Ukhuwwah Basyariyyah* (ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI”. Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN, berdiri Agustus 1998) memosisikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa. Sekalipun begitu, PAN mendefinisikan diri sebagai partai yang terbuka bagi semua dari berbagai latar belakang. PAN menentukan visi sebagai partai yang ingin mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, demokratis dan berdaulat. Partai Persatuan Pembangunan (PPP, berdiri 1973) sebagai partai lama menyatakan visinya, “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.” Sementara itu, dalam keislaman, PPP menyatakan perlunya penataan masyarakat Islami dan menempatkan Islam sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan. Islam dan negara, dalam pandangan PPP perlu membangun relasi yang saling memelihara.

Melihat identifikasi partai-partai politik berhaluan Islam tersebut, terlihat bahwa PK(S) dan PPP secara eksplisit mengidentifikasi diri sebagai partai dengan

platform Islam, sementara itu PKB dan PAN secara eksplisit mengidentifikasi diri sebagai partai berplatform Islam namun menunjukkan diri sebagai partai yang terbuka dan inklusif (Sirry, 2006:471). Dalam beberapa kasus, PK(S) juga menyatakan diri sebagai partai terbuka, misalnya dengan menerima calon legislatif beragama non-Islam, namun keberakaran PKS dari kader Lembaga Dakwah Kampus yang terinspirasi dari Muslim Brotherhood di Mesir, membuatnya sulit membentuk identitas terbuka. Dalam pengelompokan yang dilakukan Baswedan (2004), partai Islam terbagi dalam tiga kategori, yakni Islamis, Islam-inklusif, dan sekuler-inklusif. Islamis mengusung identitas Islam dan ingin mengubah tata sosial kemasyarakatan dan negara berdasarkan hukum Islam, sedangkan Islam-inklusif memandang antara negara (Pancasila) dan Islam dapat sejalan sehingga yang perlu dilakukan adalah mendorong terbentuknya civil society berasaskan Islam, bukan mengganti prinsip kenegaraan. Partai beraliran sekuler-inklusif yang dimaksud Baswedan yaitu partai sekuler yang terbuka menerima Islam dan memiliki ciri khas Islam (Baswedan, 2004:679). Namun begitu, tipologi ketiga ini sebenarnya tidak menjelaskan partai Islam itu sendiri.

Pertentangan ideologis dalam tataran filosofis terjadi antara partai nasionalis dengan partai Islamis, khususnya dengan partai Islamis yang menyuarakan diterapkannya Syari'a dan dikembalikannya 7 kata dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini mengemuka terutama pada masa pemilu pertama pasca orde baru (1999) dan tahun-tahun setelahnya. Gerakan ini terjadi dalam dua bentuk baik melalui jalur formal di legislatif maupun gerakan massa. Massa kelompok Mujahidin menyerukan diterapkannya Syari'a, misalnya dalam kongres di Yogyakarta. "Beri kami kesempatan untuk memimpin. Kalau dalam tempo 20 tahun Indonesia tidak menjadi adil dan makmur, potong leher kami," begitu seruan Mursalin Dahlan, salah satu tokoh Mujahidin dalam kongres Mujahidin ke I, di Yogyakarta 7-9 Agustus 2000. Sedangkan, melalui jalur formal, pada proses Amandemen UUD 1945 yang berlangsung 4 tahap (1999, 2000, 2001, dan 2002), PPP dan PBB meminta pasal 29 tentang agama turut diamandemen dengan mengembalikan 7 kata dalam UUD, yakni "...dengan kewajiban menjalankan Syari'a Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Pada tahun 2000 seruan itu menguat, namun tidak ditanggapi. Sidang tahunan MPR untuk amandemen tahun 2001 juga tidak membahas tujuh kata tersebut. Saat itu usulan amandemen sudah sampai pada ad hoc dengan tiga pilihan: dikembalikan 7 kata secara utuh, diganti menjadi "dengan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya", dan tidak mengubah pasal 29 sama sekali. Pertarungan ideologis terjadi antara fraksi reformasi dimotori PAN dan PK dengan partai mayoritas di MPR, yaitu PDIP, Golkar, dan PKB. Sampai amandemen selesai, pasal tersebut tidak diubah (Nursalim, 2007:147).

Kekuatan partai-partai nasionalis berhadapan dengan partai agama tidak diragukan dilihat dari jumlah pemilihnya. Pada pemilu 1999 partai nasionalis memenangkan pemilihan umum melebihi partai-partai berbasis agama dan Islam (Anwar, 2009:356-357). Pemilu-pemilu selanjutnya pun kurang lebih demikian. Presentase terbesar yang didapatkan partai agama adalah PKB yang pada tahun 1999 mendapat 10,7%. Setelahnya, ketiga partai Islam besar lainnya (PPP, PKS, PAN) mendapat presentase antara 6-9%. Sedangkan kemenangan selalu ada pada partai nasionalis.

Maka, praktek pertentangan ideologi-ideologi dalam demokratisasi di Indonesia lebih merupakan sebuah konsolidasi demokrasi. Partai-partai berideologi tertentu menyatakan identitas politiknya dan dalam alam demokrasi mencari simpatisan untuk mendapatkan kekuasaan. Perolehan suara merupakan

suara rakyat yang dipercayakan kepada partai. Namun demikian, aspirasi partai Islamis yang berkeinginan merubah sistem negara dan sistem hukum merupakan agenda politik agama. Dalam konteks kebangsaan, perubahan sistem negara merupakan tindakan di luar hukum.

Politik Identitas, Matinya Ideologi, dan Politik Transaksional

Gejala kedua yang muncul dalam demokratisasi pasca orde baru adalah menguatnya politik identitas yang dimanfaatkan oleh kepentingan politik untuk meraih kekuasaan. Dengan demikian, yang terjadi bukan sekadar kontestasi ideologi-ideologi, namun bersamaan dengan gejala sosial bangkitnya agama dan politik identitas terjadi tumpang tindih kepentingan politik dan identitas hingga kemudian memunculkan politik identitas, khususnya politik agama untuk mencapai kekuasaan.

Pada tahap pertama pasca orde baru, politik identitas menghasilkan luka yang berat pasca 1998 dengan terjadinya kerusuhan dan kekerasan antar etnis di Ambon, Maluku (1999), Poso, Sulawesi Tengah (2000-2001), dan Sampit, Kalimantan Tengah (2000-2001) (Klinken, 2007). Saat itu, yang terjadi adalah menguatnya sentimen antaretnis yang mengantarkan pada permusuhan dan pembunuhan karena adanya pemantik konflik. Masyarakat dan pemerintah seperti tidak memiliki daya untuk menangkal dan mengatasi konflik yang berkepanjangan.

Memasuki dua pemilu terakhir ini, 2014 dan 2019, politik identitas memainkan peran yang besar, ditambah lagi dengan beberapa peristiwa terkait pilkada Jakarta saat Ahok dan Anies Baswedan memperebutkan posisi gubernur. Yang terjadi bukan kontestasi ideologi di mana ideologi-ideologi menyampaikan visi misi dan program bersumber dari ideologinya, namun, akumulasi identitas untuk menyerang identitas lawan politik dengan pengerahan massa. Maka, gejala *pertama*, identitas menjadi akomodasi politik untuk memperoleh kekuasaan. Demokratisasi berjalan menegangkan karena identitas dimainkan di tempat publik, tempat ibadah, dengan pengumpulan massa.

Tak hanya itu, pemanfaatan identitas sebagai cara akumulasi suara semakin menggejala ketika para politikus mendekati tokoh-tokoh penyokong identitas (tokoh agama) untuk dapat meraup suara melalui tokoh tersebut. Hal ini terjadi dalam pemilu terakhir (2019), dan pilkada Jakarta. Para calon meminta restu, mendatangi tokoh agama kharismatis, bahkan mengambil tokoh agama sebagai partnernya. Sejak pasca orde baru hal ini terjadi dengan mengangkat beberapa tokoh agama penting (Gus Dur, Hasyim Muzadi, dll). Maka, gejala *kedua*, identitas digunakan oleh tokoh-tokoh politik dengan cara mendekati tokoh kharismatik dari penyokong identitas tersebut untuk mendapat dukungan dari pengikutnya. Hal ini terjadi pada banyak calon yang ingin merebut hati pemilih. Patronisme menelung demokrasi yang harusnya lahir dari pilihan personal sadar atas program yang akan dipilih.

Gejala *ketiga*, identitas menjadi penyokong politik transaksional. Tokoh kharismatis (tokoh agama) bukan hanya didekati oleh para politikus untuk mencari simpati massa, namun keduanya telah kehilangan ideologi masing-masing. Ideologi telah mati (*the end of ideology*), bukan hanya terjadi pada ideologi politik global, misalnya yang disampaikan Daniel Bell (1960) yang mempertanyakan ideologi sosialis-komunis yang hancur di Soviet, namun pada politik Indonesia, sebelum ideologi partai kuat berakar, ideologi yang dimiliki sudah melemah bahkan mati. Ideologi politik telah melemah diganti politik transaksional antara tokoh politik dan tokoh karismatis. Terjadi aliansi pragmatis untuk saling memanfaatkan. Hal ini terjadi, misalnya pada pemilu terakhir (2019)

ketika tokoh politik Tommy Soeharto yang partainya baru saja lolos pemilu pergi menuju Mekkah menemui Habib Rizieq. Kedua pihak saling mendukung dan setuju untuk masuk koalisi adil makmur, padahal, sebagaimana ditunjukkan Azis (2019), Habib Rizieq selama ini menjadi pengkritik keras orde baru dan penerapan Pancasila yang dilakukan orde baru. Menurut Rizieq, penerapan Pancasila oleh orde baru telah mengorbankan umat Islam. Namun, ideologi telah mati, diganti politik transaksional berdasar identitas. Dekade sebelumnya, politik transaksional juga telah terjadi namun bukan berdasar identitas agama, misalnya dengan berkoalisinya Megawati dengan Prabowo Subiyanto untuk maju pada pemilihan presiden dan wakil presiden (2004).

Peran Pendidikan Humaniora?

Gejala-gejala perubahan dalam demokrasi pasca orde baru, dengan demikian, ditandai pergeseran dari demokrasi sentralistik kepada demokrasi kerakyatan dan keragaman partai-partai politik. Namun, dalam perkembangannya, ideologi partai-partai politik begitu lunak dan berubah menjadi politik transaksional yang menunggangi politik identitas. Pengolahan politik identitas menjadi tugas besar jangka pendek yang harus dipikirkan oleh bangsa Indonesia. Ia bisa menggerogoti demokratisasi yang telah berjalan.

Terobosan yang dapat ditempuh untuk memperkuat demokratisasi adalah dengan memperkuat budaya politik. Konsolidasi budaya politik, praktis dapat terjadi di mana saja, entah dalam masyarakat maupun dalam lingkup yang lebih sempit seperti pendidikan. Budaya politik yang dimaksud adalah segala perilaku dan sikap yang selalu berdimensi politik namun didasari oleh sikap yang dewasa dan beradab (Suseno, 1999:50, Hefner, 2005). Dengan demikian, politik yang pada dirinya sendiri hadir di mana-mana menjadi sebuah kebiasaan yang dihidupi dengan dewasa. Dengan kata lain, kesadaran manusia sebagai makhluk politik terrealisasi dalam kehidupan sehari-harinya yang terbuka terhadap politik dan menyikapinya dengan jujur, dan (khususnya dalam konteks pendidikan) mendekatinya dengan daya pikir kritis.

Pendidikan humaniora yang membedakan diri dari ilmu alam dan ilmu sosial, memiliki peluang untuk memberikan kontribusi khas bagi demokratisasi (Sastrapratedja, 2015). Bahkan, tugas berat bagi universitas adalah membangun humanisme baru dimana orang mengalami transformasi eksistensial dan memunculkan kreativitas-kraektivitas baru bagi kemajuan masyarakat (Sastrapratedja, 2013:335). Beberapa hal berikut, menurut pendapat penulis, dapat ditempuh oleh pendidikan humaniora untuk menumbuhkan budaya politik:

1. Pendidikan Kewargaan

Pendidikan humaniora yang perlu dikembangkan dalam konteks politik demokrasi adalah mendidik manusia sepenuhnya menjadi manusia bebas dan menjadi warga negara, yang dalam istilah Driyarkara disebut liberalisasi (Driyarkara, 2006:705-730). Ketika mengembangkan pendidikan *humanitas*, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) terutama hendak mendidik para muridnya untuk menjadi orator yang ulung, namun konsep *humanitas* ini kemudian disepadankan dengan konsep *paideia* dalam pemikiran Yunani yang berusaha mendidik manusia untuk menjadi manusia-yang-sepenuhnya dan menjadi warga negara (Sastrapratedja, 2015).

Pendidikan kewargaan, dengan demikian, adalah satu aspek penting dalam pendidikan humaniora. Manusia (muda) sadar akan peran dan hak-haknya sebagai warga negara. Pada ujungnya, manusia yang sadar akan peran dan hak-haknya sebagai warga negara dapat terlibat dalam realitas sosial di sekitarnya. Pendidikan kewargaan ini bukan hanya ditujukan bagi mahasiswa formal di perguruan tinggi, namun menjadi modal dasar bagi seluruh warga negara.

Pendidikan kewargaan mengajak orang dalam negara berpikir dan terlibat akan keberadaannya sebagai warga di dalam negara. Pendidikan humaniora memiliki tugas melakukan pendidikan kewargaan kepada masyarakat.

2. Berpikir Kritis-Solutif

Langkah metodis mengembangkan manusia (muda) dalam pendidikan adalah menumbuhkan budaya berpikir kritis. Forum pendidikan bukanlah pertama-tama sebagai tempat untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia (muda) atau melatih ketrampilan-ketrampilan tertentu, namun pertama-tama adalah tempat untuk mengembangkan daya pikir. Manusia dalam proses pendidikan berpikir tentang hal-hal di sekitarnya dan bidang yang digeluti.

Dalam hal demokratisasi, pendidikan humaniora memiliki kekhasan untuk melihat dan mendekati realitas secara lebih komprehensif berpijak dari unsur-unsur humanis. Maka, beberapa aspek ini dapat menjadi ranah dan arena pendidikan humaniora. Antara lain, kepekaan budaya (*cultural sensibility*), kesadaran sejarah, dan kreativitas pendekatan masalah secara lintas ilmu (budaya, religi, bahasa, dll).

Sumbangan pendidikan humaniora dalam masyarakat, dengan demikian, menumbuhkan kesadaran untuk berpikir kritis dan memberi tawaran solusi bagi permasalahan bangsa. Cara berpikir kritis dengan memberi pendasaran kuat pada aspek kesejarahan, kebudayaan, dan cara pikir multidimensi menjadi jalan terobosan yang diperlukan oleh demokratisasi Indonesia. Selain itu, di tengah ideologi-ideologi atau matinya ideologi, orang diajak untuk berpikir kritis tentang ideologi-ideologi atau tiadanya ideologi tersebut. Cara berpikir demikian, dapat menguatkan budaya politik di tengah masyarakat. Warga, pada akhirnya, akan mengembangkan cara berpikir politis-humanis.

3. Budaya Resolusi-Konflik

Keadaban dan sikap dewasa dalam demokratisasi semakin diuji dalam caranya menyelesaikan konflik. Pertama-tama demokratisasi harus berada dalam koridor demokrasi, yakni keterlibatan, kebebasan, dan kesetaraan. Perbedaan dan posisi berlawanan tetap harus berada dalam koridor demokrasi. Bila terjadi konflik di luar jalur demokrasi, koridor penyelesaian konflik seringkali bukanlah sekadar soal hukum atau keamanan semata, namun juga soal kebudayaan dan aspek multidimensional manusia. Pendidikan humaniora diperlukan untuk mengembangkan budaya damai dan resolusi konflik.

4. Pendidikan Keragaman dan Identitas

Kesadaran pluralitas budaya sampai kapanpun mutlak menjadi kesadaran seluruh warga negara Indonesia. Pluralitas bagi bangsa Indonesia seperti telah menjadi akar kenegaraan. Negara Kesatuan Indonesia yang terbangun dari ribuan pulau dengan kebudayaannya yang beragam akan menjadi potensi besar, namun pada saat yang sama dapat menjadi sumber bahaya besar. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bagaimana perbedaan yang tidak terolah mengarahkan masyarakat pada kekerasan, konflik yang berkepanjangan, dan penghancuran.

Untuk itu demokratisasi perlu dibarengi dengan pembangunan kepekaan budaya di tengah masyarakat yang pluralis, yang berarti menghargai multikulturalisme dalam bingkai kesatuan Indonesia. Kebhinekaan yang telah dirajut bangsa Indonesia menjadi medan bagi ilmu humaniora untuk mengolahnya kembali dalam konteks jaman dan kebutuhan yang baru.

Kesimpulan

Langkah maju dalam demokratisasi Indonesia pasca lengsernya Soeharto ditunjukkan dengan kebebasan menyalurkan aspirasi politik baik dalam pemilihan umum maupun segi kehidupan lainnya. Ideologi-ideologi bertumbuh dan

berkontestasi dalam pemilihan umum. Demokrasi sentralistik bergeser kepada demokrasi populis dan kerakyatan dengan munculnya beragam partai. Namun, dalam perkembangannya, ideologi partai-partai politik begitu mudah melunak demi memperoleh kekuasaan. Dibarengi dengan tumbuhnya sentimen identitas di masyarakat, demokratisasi Indonesia masuk pada politik transaksional yang cenderung memanfaatkan politik identitas. Politik identitas dalam politik transaksional menurut pandangan penulis sangat berbahaya bagi kelangsungan demokratisasi Indonesia.

Melihat gejala-gejala sosial dalam demokratisasi Indonesia pasca orde baru tersebut, diperlukan penguatan budaya politik di masyarakat. Pendidikan humaniora dapat memberi sumbangan khas dengan melakukan pendekatan humanis dan lintas ilmu, memperhatikan kesadaran budaya dan kesejarahan. Pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis menjadi kekuatan pendidikan humaniora untuk memberikan sumbangannya bagi demokratisasi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amir, Zaenal Abinin. *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Anwar, M. "Syafi'i." "Political Islam in Post-Soeharto Indonesia: The Contest between 'Radical-Conservative Islam' and 'Progressive-Liberal Islam'." *Southeast Asia and the Middle East: Islam, Movement and the Longue Durée* (2009): 349-385.
- Baswedan, Anies Rasyid. "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory." *Asian Survey* 44.5 (2004): 669-690.
- Driyarkara, Nicolaus. *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Feith, Herbert, dan Lance Castle (ed.). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Hefner, Robert W., ed. *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*. New Jersey: Princeton University Press, 2009.
- Magnis-Suseno, Franz. "Membangun Kembali Sebuah Budaya Politik Indonesia" dalam Sindhunata, ed. *Pergulatan Intelektual Dalam Era Kegelisahan*. Yogyakarta: Kanisius, 1999, hlm. 49-64.
- Nursalim, Muh. "Politik Hukum Dalam Amandemen Pasal 29 UUD 1945: Telaah Terhadap Upaya Penerapan Syaria'ah Islam Di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 30.64 (2007): 147-156.
- Sastrapratedja, M. *Pendidikan Multidimensional*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma, 2015.
- Sastrapratedja, M. *Pendidikan Sebagai Humanisasi*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma, 2001.
- Sirry, Mun'im A. "Transformation of Political Islam in Post-Suharto Indonesia" dalam Ibrahim M. Abu-Rabi (eds.) *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. New York: Blackwell, 2006, hlm. 466-481.
- Van Klinken, Gerry. *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. New York: Routledge, 2007.